

Pendahuluan

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma, yaitu dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Artinya ketiga dharma ini dapat dilakukan secara terpadu. Keterpaduan ini dipahami sebagai upaya penguatan fungsi dari masing-masing tri-dharma. Proses pembelajaran kepada mahasiswa akan lebih bermakna tatkala dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan kaidah dan prosedur penelitian yang baik, serta dalam rangka memberikan layanan (pengabdian) kepada masyarakat. Demikian pula dengan kegiatan penelitian yang memberikan ruang lebih besar kepada keterlibatan masyarakat diyakini akan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga merupakan perwujudan dari pengabdian perguruan tinggi yang sesungguhnya karena berbasis penelitian.

Namun dalam implementasinya selama ini antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi atau integrasi, artinya hasil-hasil penelitian tidak digunakan dalam pengajaran ataupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, atau sebaliknya hasil pengabdian tidak digunakan sebagai sumber pembelajaran dan penelitian. Lebih dari itu pengabdian masih dipandang lemah dibanding dharma lainnya. Adalah menjadi sia-sia jika hasil pembelajaran maupun penelitian tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat, seolah perguruan tinggi lepas dari tanggungjawab sosialnya.

Sebagai salah satu cara untuk melakukan pengabdian sekaligus menjaga integrasi dalam tridharma, perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan masyarakat. Sebenarnya interaksi individu kampus dengan masyarakat telah lama dilakukan terbukti banyak dosen yang melakukan pengabdian melalui ceramah, khutbah maupun bentuk *transfer knowledge* lainnya kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak dilembagakan sehingga masih dipandang sebelah mata dan menjadi sampingan dari kegiatan individu kampus.

Oleh karena itu dalam rangka sinergitas dan intergasi tiga dharma secara terpadu, tanpa adanya pandangan lemah dan terpisah satu dharma dengan dharma lainnya, dibutuhkan rencana strategis (renstra) sebagai dasar yang harus dipedomani dalam menjalankan kemitraan universitas dengan masyarakat yang kemudian disebut sebagai renstra UCE (*University Community Engagement*) atau renstra KUM (kemitraan universitas dengan

kepada definisi sosiologis, perubahan sosial terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.¹ Bila dilihat dalam lingkup organisasi maka perubahan organisasi adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektifitas organisasinya. Tujuannya adalah mencari cara baru atau memperbaiki dalam mempergunakan *resources* dan *capabilities* untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders.

Perubahan yang terjadi di UIN dalam pembahasan ini dimulai sejak alih status IAIN menjadi UIN, yang tidak hanya ditandai dengan berubahnya aspek kelembagaan, tetapi juga pada perumusan kembali jati diri lembaga pendidikan tinggi Islam, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. UIN Sunan Ampel berusaha menemukan keunggulan yang ditawarkan, yaitu menjadi universitas yang dekat dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai implementasi dari hal ini adalah bagaimana operasionalisasi Tridharma UINSA dapat langsung bersentuhan dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini di dasarkan dalam pemikiran bahwa seluruh proses civitas akademika dan operasionalisasi tridharma apabila tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka pada dasarnya perguruan tinggi telah kehilangan arah dan fungsi utamanya dalam kehidupan. Oleh karena itu upaya terus menerus dalam meningkatkan fungsi dan peran yang dimainkan perguruan tinggi dalam kehidupan masyarakat senantiasa dilakukan. Untuk menjadi perguruan tinggi yang lebih dekat dengan masyarakat, perubahan cara pandang menjadi sangat fundamental. Utamanya cara pandang pada diri kalangan universitas, hubungannya dengan masyarakat.

Dalam rangka menuju perubahan tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya telah memiliki rencana strategis kemitraan universitas dengan masyarakat (Renstra KUM) dengan nama *university community engagement* (UCE Strategic Planning). Penyusunan renstra pada awalnya merupakan bagian dukungan program SILE (*Supporting Islamic Leadership*). Seperti yang dijelaskan oleh Nadhir Salahuddin sebagai bagian dari tim renstra KUM, bahwa penyusunan renstra dalam konteks ini ada dua

¹ Gillin , J.L. and Gillin, J. P, *Cultural Sociology*, 1954, hal 561-562

Renstra UCE UINSA dikembangkan menggunakan pendekatan participatoris. Sebuah pendekatan dimana stakeholder menjadi aktor utama dalam mengembangkan renstra tersebut. Penempatan stakeholder sebagai actor utama dibutuhkan proses-proses fasilitasi yang tepat. Dalam kegiatan konsultasi dan jaring aspirasi kepada multistakeholder, kegiatan banyak diwarnai dengan aktivitas yang bersifat workshop, sehingga kemampuan *task force* dalam melakukan fasilitasi sangat dipentingkan disini. Pendekatan partisipatoris, bisa dilaksanakan dengan baik tatkala pihak-pihak yang terlibat didalamnya melakukan kegiatan dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Inilah kemudian mengapa proses fasilitasi menjadi penting.

Untuk mendukungnya melalui penguatan kapasitas stakeholders UIN SILE memberikan bantuan dalam bentuk pengiriman dosen maupun pejabat UINSA dalam rangka *shortcourse* dan *visit* ke beberapa perguruan tinggi yang mengembangkan beberapa program terkait dengan kemitraan, baik program yang linier dengan penelitian, pengabdian maupun gender. Tercatat di kantor SILE, bahwa sebanyak 50 (limapuluh) SDM UIN yang mengambil program shorcourse di Canada dan Philipina, dengan spesifikasi program yang amat beragam seperti, *Facilitation and training approaches for comunity change*, *Building Capacity for Community-Engaged Research*, *Research for Citizen-Led Change*, *Mobilizing Assets For Community-Driven Strategy & Tools*, *Integrating Food Justice into Community Programs*, *Fundamental of Peace Building A Force More Power: Theory & Practice of nonviolence*, *Interreligious Dialogue and Peacebuilding: Frameworks & Applications*, *Community Driven Impact Assessment* *Community-Based Microfinance for Financial Inclusion*.

Dengan dukungan SILE juga, UINSA menjalin kemitraan dengan OMS (organisasi masyarakat sipil) yang terlibat dalam kegiatan pengabdian dan penelitian seperti Fatayat NU, Aisyiah, Savy Amira, Walhi, Spektra, Madrasah dan beberapa kabupaten seperti Sidoarjo, Bondowoso, dan pemerintah kota Surabaya. Selain itu LP2M sebagai *leading sector* program kemitraan, semakin memperluas jaringan kemitraannya dengan beberapa kabupaten seperti Bojonegoro, Madiun, Kediri dan Magetan.

LP2M UINSA Surabaya dan Tugas Kemitraan

LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan lembaga yang dibentuk sejalan dengan persiapan beralihnya status IAIN menjadi UIN. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada PMA

2. Membantu universitas dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan dua program dari tri dharma perguruan tinggi sehingga kegiatan terlaksana secara baik dan saling terintegrasi
3. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya, skala nasional maupun internasional dalam bidang penelitian dan penerbitan, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi studi gender dan anak.

Sebagaimana dipahami bahwa LP2M mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator tugas penelitian pengabdian dan gender. Itu artinya bahwa tugas LP2M hanya berkisar tiga poin penting itu. Namun demikian penjabaran dari tugas tidak lepas dari jalinan kemitraan (*engagement*) dengan masyarakat, seperti pengembangan penelitian yang berbasis komunitas yang selalu melibatkan komunitas atau masyarakat, pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat, menggunakan potensi yang ada di masyarakat dalam rangka pengembangan masyarakat, serta bagaimana menerapkan gender *mainstreaming* dalam masyarakat.

Sebelum *renstra KUM* disusun, kemitraan dimaknai sebagai kerjasama (*partnership*) dengan stakeholder dari luar. Pelaksanaan tugas kerjasama dalam struktur kelembagaan di UIN Sunan Ampel dikerjakan oleh bidang yang menggawangnya yaitu bagian kerjasama, yang berada dibawah garis koordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. namun demikian tidak menutup kemungkinan unit lain atau fakultas yang berada dibawahnya atau setara dengannya tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, tetapi tetap memberikan keleluasaan untuk melakukan hal yang sama, tetapi harus ada laporan atau koordinasi dengan bagian kerjasama.

Kemitraan dalam frame KUM yang sudah tertuang didalam *renstra* memberikan warna tersendiri dalam koridor tugas-tugas LP2M. Kemitraan dalam hal ini tidak hanya dimaknai dengan kerjasama tetapi dapat melalui proses kerjasama. Kemitraan disini dimaknai lebih luas dengan prinsip-prinsip kemitraan yang perlu dipedomani seperti spiritual, inklusif, setara, terpadu, kolaboratif, unggul, inovatif, manfaat, mandiri, ramah lingkungan, memberdayakan, transparan dan akuntabel serta berkelanjutan.

sebagai sebuah isu strategis yang ingin dicapai dengan rumusan “Pengembangan sistem pembelajaran berbasis riset dan pengabdian masyarakat”

Keterpaduan tridharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Hal ini sejalan dengan karakter kajian keIslaman yang dikembangkan di UIN Sunan Ampel yang memiliki kekuatan pada kajian KeIslaman yang aktual dan kontekstual menawarkan wajah Islam keIndonesian kepada dunia. Corak Kajian keIslaman ini hanya mungkin diwujudkan tatkala operasionalisasi tri-dharma secara sistematis didisain dan diselenggarakan atas dasar kemitraan dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah rencana kemitraan universitas dengan masyarakat yang diharapkan menjadi dasar pijakan penyelenggaraan UIN Sunan Ampel sebagai sebuah dukungan untuk mewujudkan rencana strategis bisnis UIN Sunan Ampel 2014-2019.

Kemitraan dengan masyarakat merupakan strategi penting sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perguruan tinggi untuk responsif terhadap kecenderungan terkini dan antisipatif perkembangan masa depan kehidupan masyarakat. Sehingga kontribusi positif perguruan tinggi sebagai rumah pendidikan dan produksi pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman akan dapat diwujudkan. Kemitraan UIN Sunan Ampel dengan masyarakat merupakan komitmen bersama dalam rangka menciptakan proses pendidikan dalam rangka menghasilkan pemimpin di masa yang akan datang untuk pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penciptaan perdamaian, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Sehingga UINSAL diharapkan dapat berkontribusi secara langsung sesuai dengan wilayah kajian keIlmuannya kepada krisis kemanusiaan terkini. Hal ini sejalan dengan perhatian dan komitmen UNESCO berkaitan dengan bagaimana meningkatkan tanggungjawab sosial perguruan tinggi.

Kemitraan universitas dengan masyarakat didasarkan atas pola hubungann yang bersifat saling memberi dan menerima. Hal ini diterjemahkan ke dalam berbagai kepentingan. Pertama, kemitraan merupakan pola hubungan atas dorongan saling berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bermitra. Pola ini akan memberikan kesempatan diantara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengisi dan menerima kemanfaatan. Kedua, kemitraan merupakan pola hubungan dimana diharapkan pengaruh kerjasama tersebut akan semakin besar dan kuat pada kehidupan masyarakat. Melalui kemitraan diharapkan, baik

juga mengajarkan bagaimana pentingnya aset dalam pengembangan komunitas.

Semua punya potensi (*No body has Nothing*) prinsip ini mengandung makna bahwa dalam konteks ABCD semua berkelebihan. Setiap manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing, tidak ada yang tidak memiliki potensi, walaupun hanya sekedar kemampuan untuk tersenyum dan memasak air. Semua berpotensi dan semua bisa berkontribusi.

Partisipasi (*Participation*) Peran seseorang atau kelompok dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, kegiatan, modal, keahlian, tenaga, waktu serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembanguna. Dalam ABCD prinsip pelibatan peran sesorang menjadi sangat penting baik dalam pengambilan keputusan, mengenal masalah, mengkaji pilihan dan memecahkannya.

Kemitraan (*Partnership*) Interaksi-interelasi antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak adalah partner. Dalam kemitraan ada kesepakatan dimana seseorang kel, organisasi, bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan, membagi tugas, menanggung bersama, baik yg berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kesepakatan bila diperlukan

Penyimpangan positif (*Positive deviance*) Sebuah pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang didasarkan pada realitas bahwa dalam setiap masyarakat-meskipun bisa jadi tidak banyak terdapat orang yang mempraktekkan strategi atau perilaku sukses yang tidak umum, yang memungkinkan mereka mencari solusi yang lebih baik atas masalah yg dihadapi daripada rekan mereka.

Realitas ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki aset mereka sendiri utk melakukan perubahan

Berawal dari dalam masyarakat (*endogenous*) hal ini mengandung makna bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pembangunan yang berdasar konteks komunitas tertentu dan dikembangkan komunitas itu sendiri.

Mengarah pada sumber energi (*Heliotropic*) untuk menggambarkan proses berkembangnya tumbuhan yang condong mengarah ke sumber energi.

Energi dalam komunitas bisa beragam diantaranya adalah mimpi besar yang dimiliki komunitas, proses pengembangan yang apresiatif, atau

pengawasan terhadap renstra KUM tidak hanya dilakukan oleh unit tertentu. Namun demikian LP2M sebagai lembaga yang tupoksinya pada aspek penelitian, pengabdian dan gender dan ketiga aspek itu menjadi sasaran inovasi baru yang dikembangkan oleh SILE, sehingga *leading sector* program ini adalah LP2M. Sebagai *leading sector* LP2M tidak hanya mengamati kegiatan ini, tetapi LP2M turut terlibat dalam mengajukan anggaran, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi terhadap program-program yang merupakan inovasi baru yang sudah dijalkannya.

Sebagaimana diketahui bahwa jenis KUM yang telah direncanakan oleh SILE bersama UINSA mencerminkan sebuah model atau pendekatan baru yang sudah dikembangkan di UINSA. Pada dasarnya UIN sebagai perguruan tinggi telah lama melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dapat berupa KKN atau kegiatan ceramah, khutbah yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. KUM dalam hal ini tidak hanya eksklusif kegiatan pusat pengabdian masyarakat dengan KKN dan ceramah yang bersifat individual, namun KUM disini melalui dukungan SILE menjalin kemitraan secara resmi, dengan organisasi masyarakat sipil baik yang bersifat keagamaan maupun tidak untuk bereksperimen dengan berbagai program KUM di 8 komunitas melalui kemitraan UINSA-OMS.

Model baru ini memiliki ciri: “keterbukaan, kemitraan, integrasi tridharma, pendekatan berbasis aset dan kepemimpinan warga, tatakelola kehidupan yang demokratis”⁷ keterbukaan berarti perguruan tinggi menciptakan lingkungan yang ramah untuk lebih memudahkan kerjasama dengan masyarakat baik dalam bentuk *outreach* (kampus menjangkau masyarakat) maupun *inreach* (masyarakat mengakses kampus). Kemitraan artinya kampus dapat bekerja dengan masyarakat sipil, pemerintah di semua tingkat dunia usaha sebagai mitra sejati dengan semangat saling memberi manfaat.

Integrasi tridharma artinya program atau kegiatan yang dijalankan dengan cara-cara inovatif melalui integrasi tridharma perguruan tinggi dalam jalinan kemitraan dengan masyarakat. sehingga ada keterkaitan antara tiga dharma tersebut. Sementara pendekatan berbasis aset dan kepemimpinan warga maksudnya menyatukan pendekatan pengembangan masyarakat berbasis pemberdayaan kekuatan aset secara partisipatif pada semua pekerjaan KUM. Dan Tatakelola kehidupan yang demokratis berbasis

⁷ Mary Coyle, Perencanaan Strategis untuk Kemitraan Universitas-Masyarakat, penerjemah Jarot Wahyudi, (Jakarta: SILE, 2015), 28

2. Perencanaan financial:

Sekilas memang tidak mudah untuk melakukan perubahan, apalagi dengan model *appreciative inquiry* yang diterapkan dengan menggali hal-hal yang positif. Harus ada semangat untuk melakukan perubahan pada masing-masing person yang ada pada lembaga, dalam hal ini LP2M sebagai *leading sector* dari banyak program-program SILE, karena banyak menyangkut dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi LP2M.

Pengalaman LP2M UINSA dalam perencanaan financial untuk mendukung pelaksanaan renstra UCE dimulai dengan merancang program yang sudah didapatkan dari SILE dalam bentuk penganggaran. Konsultasi dengan bagian perencanaan universitas kerap kali dilakukan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis.

Meski telah berjalan dengan lancar pada point ini namun bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangannya adalah LP2M sebagai lembaga baru yang menginginkan perubahan, terkadang mengalami kesulitan karena tidak semua person mempunyai *ghirah* yang sama dalam mendukung terlaksananya renstra ini, walaupun semua person mulai dari pimpinan sampai staf mempunyai keinginan untuk berubah menjadi lebih baik.

Perbedaan pendapat menjadi keniscayaan yang harus dicari titik temunya sehingga dicapai tujuan yang diinginkan. Karena memang betapa banyak hal yang harus dikerjakan dan mendapat perhatian selain program-program SILE, yang menurut tiap person akan berbeda prioritasnya. Satu person menyatakan program A yang paling penting sementara person yang lainnya program B atau bahkan C yang paling penting untuk segera dilaksanakan. Adaptabilitas dan kohesitas menjadi sesuatu yang penting bagi manajemen LP2M. Ada pihak-pihak tertentu yang harus “mengalah” sebagai bentuk adaptasi untuk melaksanakan sesuatu yang mengarah kepada perubahan.

Melakukan plotting anggaran dengan memasukkan beberapa program yang telah tercantum dalam renstra sebagai bentuk implementasinya. Pengalaman di LP2M UINSA memang harus ada orang yang secara khusus mempunyai perhatian dan berkonsentrasi terhadap permasalahan anggaran, karena begitu banyak program yang akan dianggarkan terkadang membuat petugas atau staf yang memasukkan dalam aplikasi RKAKL dan melakukan SPJ atau laporan pertanggungjawaban menjadi sedikit berkeberatan. Namun demikian

penggunaan ABCD sebagai pendekatan KKN, perluasan wilayah dampingan, integrasi gender dalam KKN, knowledge manajemen.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mempunyai beberapa kekuatan misalnya dukungan dan semangat dari para peserta workshop akan kegiatan yang mereka ikuti dan tidak jarang mereka menginginkan untuk menjadi peserta workshop baik itu CBR, ABCD maupun SL. Mereka juga menginginkan bahwa workshop ini tidak cukup sekali perlu dilanjutkan dalam tataran praktik langsung ke lapangan. Misalnya walaupun workshop CBR sudah dilaksanakan SILE dengan budget dari GOC (Government of Canada), namun LP2M juga menyelenggarakannya sebagai upaya sosialisasi sekaligus menyediakan dana untuk pilot project CBR sebagai bentuk praktik dari CBR. Dukungan dari pimpinan dan pihak terkait penyelenggaraan program-program SILE menjadi penting dalam hal ini.

Meski kegiatan ini berjalan lancar namun ada beberapa kendala misalnya, narasumber untuk kegiatan. Sebagaimana diketahui bahwa UINSA adalah bagian dari pilot project program SILE/LLD selain UINAM, oleh karenanya dua PT ini dipandang lebih “expert” dari PTKIN yang lain terkait program tersebut. Masing-masing PTKIN ini mempunyai kelebihan dan keunggulan, namun ada upaya optimalisasi pemanfaatan SDM lokal yang dipunyai karena dipandang lebih baik dari SDM lain, memang ini kesannya subyektif, namun dari pengalaman menjadi narasumber pada beberapa pelatihan program yang dimaksud diatas menjadikan tidak ragu menggunakan SDM lokal. Oleh karenanya sejak awal ada niatan untuk menggunakan SDM lokal sebagai narasumber pelatihan. Namun ini terkendala dengan aturan keuangan yang mengharuskan narasumber dari luar universitas jika peserta adalah dosen universitas itu sendiri, sehingga terkadang membuat panitia terpaksa mencari narasumber dari luar walupun hasilnya menurut peserta masih dirasa kurang memuaskan. Kendala yang lain adalah pemotongan anggaran di tahun yang sama ketika telah menjalankan kegiatan. Sehingga hal ini mengganggu apa yang sudah direncanakan.

Kendala lain adalah kesibukan SDM dosen dengan aktivitas mengajar atau jabatan struktural lainnya sehingga tidak dapat dilibatkan dalam program ini secara maksimal, keterlibatan aktivitas hanya orang-orang tertentu yang rata-rata mereka mempunyai kesibukan yang luar biasa. Misalnya ketika LP2M mempunyai kebutuhan dalam hal analisis dan mapping laporan penelitian dan pengabdian serta evaluasi hasil

Center for Leadership, St. Francis Xavier University Canada, penasehat UCO (University Community Outreach) sebagai fasilitator yang membantu memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi UCE plans.

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa hal:

- Identifikasi program-program yang terimplementasi di masing-masing perguruan tinggi dalam hal ini di UINSA dan UINAM secara umum
 - Mengungkap beberapa kendala yang dihadapi masing-masing PT dalam implementasi
 - Mencari kemungkinan yang bisa dilakukan sebagai solusi yang terbaik dan termudah untuk dijalankan
 - Membahas kebijakan UIN tentang pengelolaan pusat-pusat studi sebagai kelanjutan dari studi banding yang sudah dilakukan bulan sebelumnya
 - Merencanakan *roundtable meeting* dengan MORA
 - Menyusun list partisipan peserta dan pembahasan yang diagendakan dalam kegiatan monitoring implementasi UCE renstra di UINSA dan UINAM
- b. Penguatan kemitraan universitas dengan masyarakat melalui workshop Monitoring dan evaluasi Implementasi renstra UCE di UINSA

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap renstra UCE, SILE mendukung diselenggarakannya workshop untuk mempermudah dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah ada pada renstra UCE.

Kegiatan ini dilaksanakan selama enam hari mengacu pada prioritas program terciptanya sistem pendukung yang mapan untuk kemitraan berbasis keterpaduan tridharma dengan agenda hari pertama adalah penyamaan persepsi dan persiapan dengan melibatkan beberapa orang yang secara manajerial berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan acara workshop ini, yaitu person LP2M, SILE dan advisor SILE dan Ibu Mary Coyle. Selanjutnya dilakukan focus group discussion terkait renstra UCE dan implementasinya di UIN Sunan Ampel dengan melibatkan wakil-wakil rektor, dekan, LP2M, SPI (Satuan Pemeriksa Internal), bagian perencanaan dan bagian keuangan tingkat universitas, pusat-pusat studi yang sudah terbentuk, advisor dan person manajemen SILE UIN Sunan Ampel.

DIPA Kementerian Agama, penyusunan gender policy yang didukung oleh SILE dan integrasi gender dalam kurikulum oleh DIPA UIN.

5. Pengembangan wilayah dampingan: melalui pusat pengabdian masyarakat LP2M telah menambah wilayah dampingan baru dari dua kabupaten menjadi empat kabupaten, sementara itu fakultas dakwah bermitra dengan masyarakat sekitar kampus atau wilayah cincin kampus dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembentukan center baru: Saat ini LP2M berupaya untuk membentuk center baru dalam rangka institusionalisasi beberapa inovasi baru yang sudah ada. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan serta kualitas setiap program yang sudah berjalan di LP2M. Selain itu di UIN terdapat dua center yang secara non struktural berdiri sendiri yaitu NCCE (*national center for civic education*) dan CPB (*center for peace building*). Dua center ini dengan dukungan SILE telah menyusun buku civic education dan terlibat dalam penyelesaian konflik sunni syiah di Sampang melalui serangkaian aktivitas CBR, dan konseling.
7. Knowledge Management: tahun 2016 ada upaya penataan terhadap produk-produk yang ada di LP2M melalui baik cetak maupun elektronik melalui dana DIPA.

Setelah diketahui hasilnya, dilakukan *roundtable meeting* yang agendanya adalah melaporkan dan meminta dukungan dari Kementerian Agama terkait dengan hasil monitoring implementasi renstra KUM ini. Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat struktural seperti dirjen pendidikan tinggi Islam dan jajarannya, SILE sebagai project yang mensupport program ini dan unsur pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Refleksi

Dari tugas mengawal implementasi renstra UCE ini, terdapat pembelajaran yang cukup berharga diantaranya adalah:

Bahwa renstra UCE adalah renstra pertama di PT ini bahkan mungkin di PT lain, selama ini sebagian besar orang mengenal hanya satu renstra, yaitu renstra PT atau renstra universitas. Di UINSA walaupun sebagian besar pejabat universitas ini telah mendengar atau mengetahui ada renstra UCE, namun sebagian mereka tidak tahu banyak isi yang tertera dalam renstra UCE itu. Sehingga ketika membahas soal kemitraan universitas

